

Judul : Publik Gamang pada Masa Depan BUMN
Tanggal : Senin, 29 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Publik Gamang pada Masa Depan BUMN

Sebanyak 52,8 persen responden dalam jajak pendapat Litbang Kompas yakin masa depan BUMN akan lebih baik bila dikelola Danantara. Namun, masih ada 42,5 persen responden lain yang tidak yakin perusahaan pelat merah itu akan lebih baik di bawah Danantara.

Perubahan nomenklatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan BUMN tinggal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Pekan lalu, dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang BUMN, Komisi VI DPR dan perwakilan pemerintah telah menyepakati perubahan nomenklatur Kementerian BUMN itu. Sementara itu, fungsi operasional dan manajemen aset negara kian diarahkan ke Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara.

Pada satu sisi, perubahan besar ini memunculkan harapan atas tata kelola. Namun, di sisi lain menimbulkan kegelisahan, akan dibawa ke mana BUMN?

Jauh sebelum revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini muncul, kegelisahan terhadap masa depan BUMN ini sudah terdapat dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada 11-14 Agustus 2025. Sebanyak 42,5 persen responden mengaku tidak yakin masa depan BUMN akan lebih baik setelah kemunculan Danantara dan wacana peleburan keduanya. Apalagi, sejak awal, Danantara sudah diberi kewenangan untuk mengelola aset BUMN termasuk di dalamnya berbagai potensi investasi strategis.

Alih-alih mengamankan posisi BUMN, bisa jadi Danantara mengambil alih penuh kekuasaan BUMN. Ditambah lagi, ke depan, antara BUMN dan Danantara akan memiliki payung hukum masing-masing. Tak bisa dipastikan bahwa potensi tumpang tindih kewenangan akan terhindarkan.

Meski demikian, 52,8 persen menyatakan yakin masa depan BUMN akan lebih cerah. Keyakinan ini boleh jadi tak lepas dari kehadiran Danantara yang dinilai dapat memperbaiki tata kelola BUMN.

Sistem merit yang diterapkan dalam Danantara, dibarengi pembagian kewenangan antara BUMN dan Danantara, diyakini akan lebih efektif dan strategis. Keduanya juga diyakini akan lebih produktif dalam mengalang investasi dan mengopti-

Yakin atau tidak yakinkah Anda dengan pengelolaan BUMN di bawah Danantara, kondisi BUMN akan lebih baik ke depannya?

Yakin atau tidak yakinkah Anda bahwa larangan rangkap jabatan dan penghapusan taniem tata kelola BUMN ke depan menjadi lebih baik?

Pendapat Pemilih

Pengukuran pendapat melalui telepon dilakukan oleh Litbang Kompas pada 11-14 Agustus 2025. Sebanyak 2.000 responden terdistribusi ke 34 kota di 18 provinsi. Jumlah responden: 2.000. Sampel dianggap mewakili dari responden yang akan memilih dalam pemilu legislatif 2025. Pengukuran dilakukan melalui jajak pendapat wawancara 35 menit, margin of error ±3,5%. 4,2% responden menolak menjawab pertanyaan. Penyebaran demografi: 50% laki-laki, 50% perempuan. 42,5% responden menyatakan tidak yakin masa depan BUMN akan lebih baik setelah kemunculan Danantara dan wacana peleburan keduanya. 52,8% responden menyatakan yakin masa depan BUMN akan lebih baik setelah kemunculan Danantara dan wacana peleburan keduanya.

Sumber: Litbang Kompas RI/18

malikan aset negara yang selama ini dinilai tak benar-benar menghasilkan. Dengan status baru BUMN, idealnya pengelolaannya juga bisa lebih independen tanpa intervensi politik berlebihan.

Momentum perbaikan

Perubahan-perubahan itu juga bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola BUMN. Tak bisa dimungkiri, BUMN saat ini tak lepas dari sejumlah problem. Jejak perjalanan BUMN selama ini juga kerap diwarnai rapor merah. Hampir separuh responden (46,8 persen) jajak pendapat menilai, salah satu problem terbesar BUMN adalah korupsi yang mengahamir kinerja perusahaan pelat merah ini.

Mengutip catatan Kompas, 20 Juli 2025 lalu, negara mengalami kerugian hingga Rp 83,3 triliun hanya dari 16 perkara korupsi di sejumlah BUMN. Ka-

sus itu terbitas pada perkara yang menonjol dan menyedot perhatian publik sepanjang 2000-2024. Salah satunya adalah korupsi di PT Timah yang merugikan negara Rp 29 triliun, plus kerugian perekonomian senilai Rp 271 triliun. Catatan serupa pun datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Sejangka 2016-2023, ICW mencatat setidaknya 212 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN. Sebanyak 349 pejabat BUMN ditetapkan sebagai tersangka dengan 84 orang di antaranya berkedudukan sebagai direktur. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 64 triliun.

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasannya. Namun, UU No 1/2025 tentang BUMN menyebutkan bahwa kerugian keuangan yang datang dari BUMN tidak lagi dianggap

JAJAK PENDAPAT Litbang Kompas

sebagai kerugian negara.

Ini beririsan dengan ketentuan baru yang menyebutkan, jajaran direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Sejumlah pihak menilai, ke depan akan sulit bagi aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan korupsi di BUMN.

Problem besar lain yang menjadi beban BUMN, disebutkan oleh 16,2 persen responden, adalah kurangnya transparansi dan pengawasan di tubuh BUMN. Tentu masih lekat dalam ingatan kasus manipulasi keuangan oleh PT Jiwasraya. Hal serupa juga terjadi di PT Antam

Menurut Anda, tepat atau tidak tepatnya larangan pejabat publik (menteri, wakil menteri, pejabat tinggi) merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN?



Menurut Anda, apa problem utama yang selama ini dihadapi BUMN?



batan di BUMN.

Sedikitnya 55,6 persen responden menilai larangan itu sebagai langkah yang tepat. Sekitar sepertiga responden menginginkan para menteri dan wakil menteri fokus pada tugas utama di kementerian.

Sementara itu, sebanyak 14,8 persen responden berharap larangan rangkap jabatan di BUMN membuka peluang bagi sumber daya manusia yang lebih kompeten di bidangnya. Selain itu, 10,3 persen responden menilai konflik kepentingan juga dapat diantisipasi.

Dua per tiga responden pun optimis tata kelola BUMN akan lebih baik. Ditambah lagi kebijakan penghapusan taniem atau bonus berbasis kinerja bagi komisaris yang sudah digulirkan sebelumnya.

Meskipun demikian, sepertiga responden lainnya tidak yakin putusan MK tersebut akan serta-merta membuat kinerja BUMN menjadi lebih bersih dan profesional. Apalagi, belum satu bulan berselang sejak putusan MK tersebut diucapkan, tiga wakil menteri ditunjuk sebagai komisaris PT Telkom. Di sinilah konsistensi pemerintah diuji.

Menariknya, tak sedikit dari responden menilai larangan rangkap jabatan di BUMN bukan solusi, bahkan di antara mereka menilai justru membuat BUMN kehilangan arah. Kehadiran menteri dan wakil menteri dianggap sebagai perwakilan pemerintah yang salah satu fungsinya untuk memperluas koordinasi BUMN dengan pemerintah.

Terlepas dari dualisme pandangan publik tersebut, sejumlah perubahan kebijakan diharapkan dapat membuat tata kelola perusahaan milik negara itu menjadi lebih baik dan mampu menjawab kegelisahan publik pada masa depan BUMN ke arah yang lebih baik.

(AGUSTINA PURWANTI
LITBANG Kompas)